

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dunia internasional digemparkan oleh konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, konflik tersebut mulai memanas di tahun 2014, atau yang lebih dikenal sebagai *Special Military Operation* (Operasi Militer Khusus) dari pihak Rusia terhadap Ukraina.

Ukraina secara historis, hampir Sebagian besar wilayahnya menjadi bagian dari republic Uni Soviet, walaupun di wilayah baratnya terbagi antara Rumania, Polandia, serta Cekoslowakia yang diakibatkan setelah terjadinya Perang Dunia I serta Revolusi Rusia di tahun 1917, di tahun 1991 Ukraina mendeklarasikan untuk kemerdekaan negaranya, sebelum adanya konflik yang terus berlanjut dengan Rusia, Ukraina sendiri telah menerima berbagai bentuk kekacauan nasional seperti, disaat adanya upaya untuk menerapkan reformasi ekonomi dan politik yang memuncak disaat penyelenggaraan pemilihan presiden di tahun 2004 yang disengketakan. Hasil dari pemilu tersebut mengundang protes massa yang dikenal sebagai Gerakan Revolusi Orange, Gerakan tersebut memberikan berbagai dampak dan Ukraina tetap terbagi berdasarkan garis regional serta etnisnya, hingga berlanjut ke tahun 2014 dimana massa melakukan Gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang terjadi di Maidan, Kyiv, di saat pemerintah sementara berusaha untuk mengakhiri kondisi perekonomian negara yang buruk, Rusia pun menduduki republic otonom Ukraina, Krimea, bertepatan di bulan Maret 2014 Krimea pun mendeklarasikan kemerdekaannya dari Ukraina lalu dianeksasi oleh Rusia (Britannica, 2024).

Di saat Ukraina berkembang dengan situasinya yang melawan kepentingan dari Rusia, akhirnya Moskow bergerak untuk mengambil sebuah tindakan, seperti halnya gerakan militer, hal tersebut sejalan dengan tujuan jangka panjang Moskow semenjak jatuhnya Uni Soviet yang secara historis akhirnya pecah menjadi beberapa negara bagian seperti halnya Rusia dan Ukraina (Menkiszak & Marshall, 2016).

Meningkatnya tekanan yang diberikan oleh Rusia terhadap Ukraina mengenai persoalan Uni Eropa yang sejalan dengan Rusia yang mengharapkan agar Ukraina segera bergabung di tahun 2011, Kyiv pun memberikan sebuah usulan yang dikenal sebagai formula 3+1, hal tersebut mengatur persoalan hubungan Ukraina dengan Uni Eropa

Cukai secara bertahap tanpa perlu mengabaikan integrasinya dengan Uni Eropa. Konsep yang diberikan oleh Ukraina tersebut ditolak oleh Moskow, Rusia pun terus mencoba untuk memperburuk kondisi keadaan hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa dikarenakan adanya peningkatan praktik otoriter yang terjadi di pemerintahan Yanukovich. Di tanggal 18 Desember 2012, Yanukovich membatalkan jadwal kunjungannya ke Moskow, hal tersebut membuat Kremlin murka, dan Rusia pun beralih kepada penekanan ekonomi langsung terhadap Ukraina, di tahun 2013 Rusia mengambil berbagai macam Tindakan seperti hal nya proteksionis serta memblokade sementara perdagangan terhadap Ukraina, akhirnya pihak Rusia pun berhasil memaksa Yanukovich agar Ukraina bergabung ke Uni Bea Cukai (Menkiszak & Marshall, 2016).

Berbagai drama yang telah terlewati antara Rusia dan Ukraina, ada suatu momen di tanggal 21 November, dimana Perdana Menteri Mykola Azarov membuat banyak warga Ukraina terkejut dikarenakan Mykola memberikan pengumuman bahwa adanya kepercayaan mengenai Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa dapat memberikan Ukraina berbagai kesempatan untuk melakukan sebuah modernisasi sesuai dengan standar Eropa dan keyakinannya untuk membuat Ukraina dapat menjadi jauh lebih baik di masa depan. Perbedaan pendapat yang terjadi di dalam Ukraina sendiri menimbulkan berbagai dampak seperti adanya demonstrasi besar-besaran yang terjadi seperti hal nya sebuah bentuk protes terhadap rezim Yanukovich. Di akhir Januari tahun 2014, kebuntuan yang tercipta antara polisi serta pengunjuk rasa pun akhirnya meningkat dan berubah menjadi sebuah bentuk kekerasan, yang menunjukkan bahwa protes terkait isu politik yang terjadi berubah menjadi sebuah bentuk revolusi (Menkiszak & Marshall, 2016).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Sosiologi Internasional Kyiv, di bulan September 2013, adanya hasil terkait pendapat masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan yang diciptakan oleh integrasi Eropa serta terkait persoalan untuk bergabung dengan Serikat Pabean, sebanyak 41% warga Ukraina lebih setuju dengan kebijakan integrasi Eropa, 35% setuju untuk bergabung dengan Serikat Pabean, 9% menentang kedua kebijakan tersebut, serta 14% sisanya belum memberikan pilihan (Menkiszak & Marshall, 2016).

Sebagian besar pemimpin yang pro terhadap Rusia yang merupakan bagian dari rezim Yanukovich, memiliki ide dimana Ukraina perlu dibagi menjadi beberapa wilayah dengan dukungan kekuatan yang kuat serta kemungkinan untuk menjalankan sebuah hubungan ekonomi luar negeri dan memiliki Keputusan hak veto atas dasar Keputusan

pemerintahan di Kyiv, namun system tersebut memiliki potensi terhadap Moskow untuk pengaruhnya yang kuat terhadap kebijakan Ukraina yang akan berjalan, terkhususnya untuk pemimpin yang berada di wilayah timur yang merupakan pendukung dari Rusia tersebut (Menkiszak & Marshall, 2016).

Pada bulan Januari akhir, Moskow pun gagal untuk menggunakan pemerintahan Yanukovich dalam tujuannya untuk mengendalikan Ukraina, dikarenakan Yanukovich telah gagal dan memilih untuk membagi Ukraina ke beberapa bagian, baik itu bagian Tenggara yang pro terhadap Rusia, yang menjadikannya merdeka secara *de facto* dari Kyiv untuk bergabung dengan Rusia, serta wilayah lainnya yang kemungkinan akan mengalami kekacauan seperti yang dapat kita lihat mengenai keberlanjutan dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tersebut (Menkiszak & Marshall, 2016).

Berbagai usaha serta tujuan yang telah dilakukan oleh Ukraina dan Rusia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, nyatanya tidak kunjung usai dan masih terus berlanjut ke keadaan yang jauh lebih buruk yang dapat dirasakan oleh pihak Ukraina, konflik yang kian memanas tersebut tentu memberikan berbagai dampak negative yang memunculkan berbagai macam permasalahan seperti halnya pengungsi dari Ukraina yang diakibatkan oleh invasi yang dilancarkan oleh pihak Rusia sejak tahun 2022. Pengungsi yang berasal dari Ukraina ini memilih untuk menyelamatkan dirinya ke berbagai wilayah, seperti halnya negara-negara yang ada di Eropa, seperti Polandia dan bahkan wilayah yang dimiliki oleh Rusia pun menjadi pilihan bagi warga Ukraina untuk berlindung (*Situation Ukraine Refugee Situation, n.d.*).

Polandia sendiri merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah yang kerap berkembang juga memudar selama berabad-abad yang diterpa oleh kekuatan Sejarah regional. Di pertengahan tahun 1500, Polandia merupakan sebuah negara terbesar dan bahkan terkuat di wilayah Eropa, namun Polandia ini pernah menderita di sepanjang abad ke-20. Di tahun 1989 pun Polandia jatuh bersamaan dengan rezim komunis di seluruh wilayah Eropa Timur (Uni Soviet) dan memulai transformasi cepat yang menjadi negara demokrasi (Hutchinson Dawson & Jasiewicz, 2024).

Polandia memiliki sejarah sebagai sebuah negara emigrasi, dikarenakan banyak warga lokal Polandia yang pergi ke arah barat untuk mencari berbagai peluang hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya, namun akhirnya negara tersebut mendapatkan persoalan imigrasi dengan skala yang cukup besar, hal tersebut merupakan sebuah momen yang

belum pernah terjadi sebelumnya sehingga menduduki posisi ke dua tertinggi di wilayah Eropa (Tilles, 2024).

Secara historis, negara Polandia ini merupakan sebuah negara yang sedikit bisa dibayangkan memberikan tanggapan yang kontra terhadap imigran, berbeda dengan hal nya dengan pengungsi yang memiliki arti yang berbeda. Persoalan para pencari suaka ini tidak hanya berasal dari Ukraina saja, namun ada juga dari negara lainnya yang berada di luar wilayah Eropa seperti para pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah. Seperti yang disebutkan oleh Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, ia menyatakan bahwa pemerintahannya akan memberikan penolakan terhadap para pencari suaka berdasarkan pakta migrasi baru yang telah diusulkan oleh Uni Eropa, dia pun menyebutkan bahwa Polandia tidak akan pernah menjadi bagian dari mekanisme usulan Uni Eropa tersebut, ucapan tersebut dimaksudkan kepada para pencari suaka yang berasal dari Timur Tengah (NFP, 2024).

Seperti yang terjadi di akhir tahun 2016, sekitar 5,2 juta pengungsi telah memasuki wilayah Pantai Eropa, yang dimana pengungsi tersebut berasal dari Suriah, Irak, ataupun Afghanistan serta beberapa negara lain yang sedang dilanda oleh konflik (Shaif, 2016).

Selama krisis pengungsi Suriah yang terjadi di tahun 2015, pemerintah beserta masyarakat Polandia bersama-sama memberikan tanggapan terkait penolakan kepada pengungsi yang berasal dari negara bagian Timur Tengah. Selama abad ke-20, Polandia sendiri merupakan sebuah negara sumber pengungsi, bukan negara tujuan pengungsi, namun hal tersebut mulai berubah disaat Polandia melakukan liberalisasi ekonominya serta meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, untuk menyelaraskan negaranya dengan Eropa Barat dan Uni Eropa, yang akhirnya hubungan antara Polandia dan Uni Eropa mulai terjalin di tahun 1989 (Friedman & Friedman, 2024).

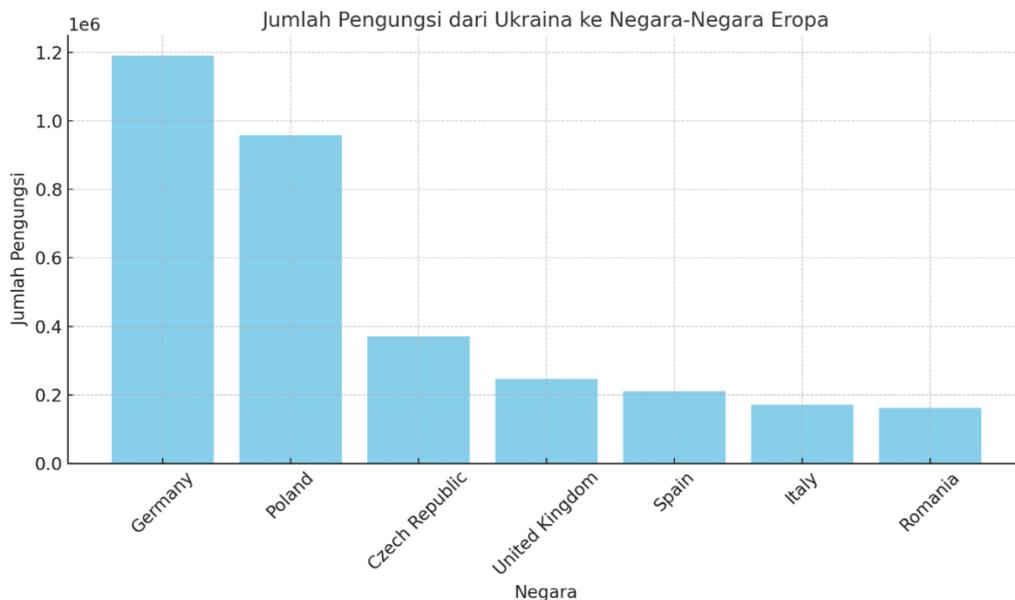
Para populasi pengungsi yang berasal dari negara Ukraina mendapatkan legalitas untuk bekerja serta tempat tinggal di seluruh wilayah negara di Uni Eropa, terkhususnya di negara Polandia fasilitas tersebut pun berlaku baik itu asuransi Kesehatan, Pendidikan, serta tunjangan. Pemerintah Polandia membangun dana bantuan semenjak kurang dari sebulan setelah invasi dari Rusia terhadap Ukraina berlangsung, dana yang dikelola dan dioperasikan melalui Bank Gospodarstwa Krajowego tersebut menyediakan berbagai macam bentuk pembiayaan agar mencukupi segala jenis proyek ataupun kegiatan dalam tujuannya membantu serta mengintegrasikan pengungsi yang berasal dari Ukraina (Fusiek, 2022).

Para pengungsi yang berasal dari Ukraina tidak hanya mencari perlindungan ke negara-negara Eropa saja, mengingat bahwa Ukraina sendiri terbagi menjadi dua sisi, yaitu yang mendukung ke pihak Barat serta yang mendukung ke pihak Rusia, tercatat bahwa para pencari suaka yang mencari perlindungan ke wilayah Rusia sebesar 1.227.555 pengungsi (ODP, 2023).

Berikut ini merupakan bagan data arus populasi pengungsi yang berasal dari Ukraina yang pergi mencari suaka ke berbagai negara wilayah Eropa;

**Gambar 1.1.**

**Data Arus Populasi Pengungsi Perang Ukraina di Wilayah Eropa (urutan negara melalui jumlah arus populasi yang terbesar-terkecil)**



*Sumber: (ODP, 2023).*

Bagan tersebut menjelaskan terkait persoalan data arus pengungsi yang berasal dari Ukraina, Negara-negara tersebut merupakan negara dengan urutan tertinggi yang menjadi tujuan dari para pengungsi Ukraina untuk mencari suaka di wilayah Eropa.

Membahas terkait persoalan para pengungsi perang Ukraina ini, seperti data diatas tercatat bahwa Jerman menduduki posisi pertama di wilayah Eropa sebagai negara penerima terbesar untuk pengungsi perang Ukraina, termasuk Polandia yang menjadi sebuah negara penerima pengungsi perang dari Ukraina dengan jumlah terbesar ke dua

di dalam lingkup wilayah Uni Eropa, dengan total sebesar 957.505 pengungsi yang terdata sejak bulan Februari tahun 2022 hingga Desember 2023 (ODP, 2023).

Berdasarkan data pengungsi perang yang berasal dari Ukraina tersebut dapat dilihat bahwa Polandia memberikan sebuah bentuk tindakan solidaritas terhadap para pengungsi perang tersebut, dengan diizinkan para pengungsi yang berasal dari Ukraina untuk masuk ke wilayah Polandia, mereka semua merupakan para pencari suaka yang berhak untuk mendapatkan haknya serta bantuan dari negara-negara lainnya seperti halnya apa yang dilakukan oleh Polandia.

Respon yang pemerintah Polandia berikan terhadap isu pengungsi, memiliki sebuah perbedaan perspektif. Pada isu krisis pengungsi di tahun 2014-2015, pemerintah Polandia memiliki perspektif yang negative terhadap para pengungsi yang berasal dari Timur Tengah, sedangkan ketika perang antara Ukraina-Rusia terjadi dan melonjak di tahun 2022, perspektif pemerintah Polandia dalam menangani isu pengungsi berubah disaat pengungsi yang berasal dari Ukraina bermunculan. Perubahan perspektif pemerintah Polandia terkait isu pengungsi tersebut akan menjadi anomali yang diangkat pada penelitian ini, dikarenakan ekspektasi berdasarkan historis yang pemerintah Polandia ekspresikan terhadap pengungsi adalah penolakan, namun kenyataannya ketika para pengungsi yang berasal dari Ukraina hadir, pemerintah Polandia menunjukkan respon yang positif dengan menerima permintaan mereka untuk mencari suaka di wilayah Polandia secara mudah.

Penelitian ini akan menganalisis melalui sudut pandang pemerintah Polandia dalam penanganan isu pengungsi Ukraina di wilayah Polandia sebagai aktornya. Argumentasi yang di angkat dalam penelitian ini yaitu, pemerintah Polandia mengubah persepsinya dalam persoalan respon krisis pengungsi, serta terjadinya perbedaan respon di tahun 2015 mengenai isu krisis pengungsi yang berasal dari Timur Tengah dengan isu krisis pengungsi Ukraina yang bermula di tahun 2022 dengan memberikan respon yang cukup positif.

Penelitian ini akan di bagi ke dalam tiga bagian sub-bab. Pada bagian sub-bab pertama akan membahas mengenai latar belakang dari perang antara Ukraina dan Rusia, dikarenakan munculnya isu krisis pengungsi yang berasal dari Ukraina tersebut disebabkan oleh perang antara Ukraina dan Rusia. Pada bagian sub-bab ke dua akan membahas mengenai dampak perang bagi Masyarakat Ukraina yang disebabkan oleh perang antara Ukraina dan Rusia tersebut. Untuk bagian sub-bab ke tiga akan membahas mengenai respon pemerintah Polandia dalam penanganan isu krisis pengungsi Ukraina.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Bagaimana respon pemerintah Polandia dalam menghadapi isu pengungsi Ukraina di Polandia?.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan dalam penelitian ini merujuk kepada batasan waktu terkait penelitian yang berhubungan dengan persoalan pengungsi perang Ukraina, yang berawal dari tahun 2022 hingga tahun 2023, mengingat bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia tersebut masih terus berlanjut.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang perang antara Rusia dan Ukraina
2. Untuk mengetahui kondisi pengungsi Ukraina di Polandia.
3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Polandia terkait pengungsi Ukraina.
4. Untuk menganalisis respon pemerintah Polandia dalam menghadapi isu pengungsi.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai sebuah bentuk dorongan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai persoalan respon Polandia terhadap para pengungsi perang Ukraina, yang diharapkan penelitian tersebut bisa dikembangkan lagi lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya dikarenakan perang antara Ukraina dan Rusia yang masih tetap berlanjut.
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi ilmu Hubungan Internasional.